

# POLITISASI AGAMA DALAM UU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

**Mohammad Hosnan dan Mohammad Takdir**

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Sumenep

[emoh.lengkong@gmail.com](mailto:emoh.lengkong@gmail.com)

[mohammad.takdir84@yahoo.com](mailto:mohammad.takdir84@yahoo.com)

## Abstrak

Artikel ini menjelaskan politisasi agama dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, apakah pasal itu mencerminkan pasal pendidikan atau agama? Ada banyak kalangan yang menilai bahwa UU Sisdiknas cenderung dijadikan instrumen untuk memecah belah bangsa dan anak didik pasti menjadi korban dari kebijakan yang menuai pro-kontra ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 13 ayat 1 terkesan memang memuat unsur-unsur untuk memotivasi agar setiap anak terdidik dalam agama. Namun, muncul kekhawatiran dalam kontes praktiknya bahwa pendidikan selama ini tidak menitikberatkan pada aspek religiusitas anak didik, melainkan kepada aspek ritualisme. Penekanan pada aspek ritualisme inilah yang membuat pemaknaan terhadap agama begitu sangat sempit dan rigid. Pemahaman agama yang sempit ini seolah-olah hanya ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan kekuasaan, yang dibalut dengan masuknya pendidikan agama dalam regulasi formalistik-kapitalistik.

**Kata Kunci:** politisasi agama, undang-undang, sisdiknas

## Pendahuluan

Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan sumberdaya manusia yang unggul dan kompetitif guna menghadapi tantangan perubahan dan perkembangan zaman yang semakin meningkat tajam. Untuk mencapai tujuan idealisme pendidikan, tentu diperlukan komitmen dalam

membangun kemandirian dan pemberdayaan yang mampu menopang kemajuan pendidikan di masa mendatang, termasuk merealisasikan visi dan misi pendidikan nasional yang reformatif, berbasis kerakyatan, dan inklusif bagi tercapainya hak dasar bagi setiap anak bangsa.<sup>1</sup> Hak itu tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 yang berbunyi “pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara”. Hak setiap warga untuk memperoleh pendidikan yang layak tidak bisa dihambat hanya karena perbedaan latar belakang kehidupan, status sosial, suku, bahasa, adat istiadat, maupun agama.

Instrumen tentang jaminan pendidikan bagi semua kalangan tanpa terkecuali, sesungguhnya sudah menjadi komitmen bersama seluruh bangsa-bangsa untuk memperjuangkan hak dasar anak dalam memperoleh pendidikan. Ini karena, pendidikan merupakan salah satu hak azazi manusia yang dilindungi dan dijamin oleh berbagai instrumen hukum Internasional maupun nasional. Tidak hanya instrumen International yang menjamin hak dasar anak dalam

---

<sup>1</sup> Mohammad Takdir, *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 15.

memperoleh pendidikan, pembukaan UUD 1945 alinea 4 juga menyatakan bahwa negara bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni dengan memfasilitasi hak dasar untuk memperoleh pengajaran. Dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab III ayat 5 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan, sehingga tidak boleh ada sikap diskriminasi dalam mengakomodasi semua keberagaman setiap anak.

Pendidikan juga merupakan proses pencerdasan bangsa yang majemuk sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945. Sebagai cita-cita pendidikan, proses pencerdasan bangsa harus ditopang oleh sistem pendidikan yang inklusif. Sistem pendidikan ini berupaya memberikan peluang sebesar-besarnya kepada setiap anak Indonesia untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang memadai demi membangun masa depan bangsa. Pendidikan inklusif meniscayakan dukungan terhadap anak didik yang termarginalkan dan terbelakang dari

lingkungannya, sehingga memperoleh hak-hak yang sama tanpa terkecuali. Representasi pendidikan inklusif bukan saja menolak diskriminasi dan ketidakadilan, namun juga memperjuangkan hak asasi manusia yang terbelenggu oleh hegemoni penguasa. Pendidikan inklusif tidak saja menjadi konsep pendidikan yang menekankan pada kesetaraan, tetapi juga memberikan perhatian penuh terhadap proses pencerdasan bangsa sebagai cita-cita bersama.<sup>2</sup>

Pemenuhan hak setiap warga untuk memperoleh pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik dan terbentuknya sebuah sistem pendidikan yang sistematis dan proporsional. Baik buruknya sebuah pendidikan bisa dilihat dari keberadaan dan penerapan undang-undang sistem pendidikannya yang mengatur secara penuh tentang mekanisme prosedural berdasarkan hak dan kebutuhan setiap warga negara sehingga memperoleh pelayanan secara proporsional tanpa melihat dari latar belakang apa seorang peserta didik. Jika sistem pendidikan nasional tidak

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 51.

mewakili semua aspirasi dan kebutuhan anak didik, maka di situ akan terjadi gesekan-gesekan yang menentang setiap kebijakan pemerintah.

Meski demikian, pendidikan sebagai upaya humanisasi tampaknya sering terbentur dengan sistem pendidikan nasional yang diatur oleh negara. Dengan segala kewenangannya, negara selalu memaksakan setiap perundang-undangan agar tidak ditentang, apalagi digugat oleh masyarakat luas. Terlebih lagi bila mekanisme pendidikan yang diatur tidak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan politik, sehingga harapan untuk mencerdakan kehidupan bangsa hanya menjadi jargon daripada cita-cita pendidikan itu sendiri.<sup>3</sup> Padahal, humanisasi pendidikan jauh lebih penting untuk diperjuangkan dari sekadar bermain-main dalam ranah kebijakan yang selalu kontroversial, apalagi mengenai RUU Sisdiknas tahun 2003 ini.

Keberadaan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merupakan seperangkat pendidikan yang semestinya perlu dirumuskan secara integral dan proporsional.

---

<sup>3</sup> Mohammad Takdir, *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 23.

UU Sisdiknas ini memuat tentang tujuan, visi, misi, hingga mekanisme prosedural pendidikan yang juga berkaitan dengan konteks sosial politik masyarakat. Buktinya, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003-sebagai pengganti UU SSPN Nomor 2 Tahun 1989-telah dirumuskan dan disahkan pada tanggal 10 Juni 2003, bahkan kini telah diimplementasikan di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Undang-undang ini pun diberlakukan untuk sekolah negeri dan swasta sehingga memantik kemarahan penyelenggara pendidikan di daerah yang kurang puas dengan rumusan peraturan ini.

Alhasil, RUU Sisdiknas ini menuai perdebatan dan pro-kontra sehingga menimbulkan kegaduhan dalam konteks penerapannya di lapangan. Lalu kontroversi apa yang paling dominan mewarnai kelahiran UU Sisdiknas ini? Polemik yang paling dominan tentu saja menyangkut pengaturan kehidupan keagamaan anak didik di sekolah atau pasal agama. Polemik ini tentu saja berkaitan dengan kepentingan kelompok agama yang tidak sepakat dengan pengesahan sistem pendidikan nasional maupun yang kelompok mengambil keuntungan dari

pengesahan undang-undang ini. Polemik ini pun diduga kuat karena ada pengaruh dari kebijakan penguasa untuk membelenggu nilai-nilai kemerdekaan, yang semestinya menjadi pijakan dasar dari tujuan pendidikan.

Kalangan pendidik lantas mempertanyakan pijakan dan dasar pengesahan UU Sisdiknas ini, yang dianggapnya mencerminkan anomali dari cita-cita pendidikan itu sendiri. Darmanigtyas seorang pemerhati pendidikan, misalnya, menegaskan bahwa undang-undang sistem pendidikan nasional seharusnya berpijak atau berpedoman pada tujuan kemerdekaan dan kebebasan, yakni untuk mencerdakan kehidupan bangsa. Dalam kasus RUU Sisdiknas ini, justru yang menonjol adalah pasal agama, yang sebenarnya tidak menyentuh substansi pendidikan sebagai upaya untuk melepaskan anak bangsa dari keterbelakangan dan kebodohan. Di luar pasal agama, banyak sekali pasal-pasal yang lebih krusial dan mendesak untuk dicari solusinya, misalnya menyangkut kapitalisasi pendidikan,

komersialisasi pendidikan, hak pendidikan untuk anak miskin, ketidakadilan pendidikan, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem pendidikan seharusnya tidak menajamkan konflik berdasarkan agama, karena aspek sangat sensitif sekali kalau dikebiri atau dilecehkan oleh suatu kelompok tertentu. Dewasa ini memang penguatan masyarakat pada identitas agama begitu tampak dan menjadi kenyataan dalam dunia pendidikan. Bahkan seringkali terbingkai proses ideologisasi yang dilakukan kelompok yang memegang kekuasaan. Bacaan jernih, bernilai akademis dan mencerdaskan seolah lenyap seketika digantikan oleh bacaan yang agamis centris.<sup>5</sup>

### **Perjalanan Sistem Pendidikan Nasional Dari Masa Ke Masa**

Sebelum masuk pada perdebatan tentang pro-kontra UU Sisdiknas, alangkah baiknya kalau kita terlebih dahulu mencermati perjalanan sistem pendidikan nasional dari dari satu

---

<sup>4</sup> Darmanigtyas, *Membongkar Ideologi Pendidikan: Jelajah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Resolusi Press dan Ar-Ruzz Media, 2004), hlm. 6.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 7.



rezim ke rezim berikutnya. Hal ini penting untuk memberikan pengetahuan dasar tentang perjalanan sistem pendidikan nasional yang sudah diterapkan pemerintah melalui berbagai keputusan dan kebijakan yang menyangkut mekanisme prosedural sistem pendidikan nasional. Pengetahuan tentang perjalanan sistem pendidikan, juga sangat membantu dalam menelisik kembali seperti apa kebijakan atau peraturan pemerintah tentang sistem pendidikan nasional yang masih dalam tahap penyusunan materi pasal-pasal yang sekiranya menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Selain memberikan pengetahuan tentang perjalanan sistem pendidikan nasional, penting juga membandingkan UU pendidikan sebelumnya, yaitu UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang pokok-pokok pengajaran dan pendidikan dan UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Upaya membandingkan kedua UU pendidikan ini bertujuan untuk mengetahui beberapa pasal yang dianggap bertentangan dan

cenderung bertolak belakang dari cita-cita pendidikan itu sendiri.

Pertama, mengurai sedikit tentang perjalanan sistem pendidikan nasional dari satu rezim ke rezim lainnya. Pada masa Orde Lama, sistem pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 dan kemudian RUU Nomor 12 Tahun 1954. Meskipun dinyatakan dengan tegas bahwa pendidikan dan pengajaran bersifat nasional dan demokratis, namun dalam perjalanannya, karena kekuatan ekonomi dan budaya akademis masih sangat rendah dan sisa pemiskinan dan pembodohan masing-masing mental kuat di masyarakat, sedikit demi sedikit pemerintah tampil semakin intensif dan mendominasi tatanan kehidupan. Pemerintah mengintrodusir sistem pemerintahan dengan inti kekuatan Nasakom lengkap dengan manifesto politiknya.

Sistem pendidikan ini makin lama jauh dari sifat yang nasional dan demokratis sebagaimana dicita-citakan sejak awal. Lembaga pendidikan praktis menjadi pusat-pusat kegiatan doktrin Nasakom dan Usdek, yaitu tidak lagi berorientasi pada

anak didik, tapi lebih pada kekuasaan. Hal ini mengindikasikan banyak penyimpanan dari cita-cita pendidikan nasional seperti terjadinya diskriminasi pendidikan antar sekolah negeri dan swasta. Antara mata pelajaran agama dan umum, diajarkan tidaknya mata pelajaran agama tergantung pada orangtua dan pilihan murid yang bersangkutan dan mata pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas.<sup>6</sup>

Sementara pada masa Orde Baru, muncul UU baru berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989. Produk pengaturan mengenai kehidupan keagamaan sebelumnya muncul pada tahun 1988 ketika pemerintah mengajukan RUU pendidikan. Namun, kelompok Islam menilai bahwa RUU tersebut sangat sekuler, karena tidak menyebutkan pendidikan agama dan juga tidak menyebutkan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang selama ini dikelola oleh Departemen Agama, yaitu madrasah-madrasah.<sup>7</sup> RUU pendidikan ini tentu

---

<sup>6</sup> Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21 (The New Mind Set Of National Education in the Century)* (Yogyakarta: Safiria Insania Press Kerjasama dengan Magister Studi Islam UII, 2003), hlm. 20.

<sup>7</sup> Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan: Peran Tokoh-Tokoh dalam Penyusunan UU No. 2/1989* (Jakarta: INIS, 2004), hlm. 43.

saja menimbulkan reaksi yang beragam mulai dari kalangan Islam sampai Kristen. Setelah terjadi gelombang protes dan demonstrasi, UU pendidikan tahun 1989 disahkan juga dengan tetap mengakomodasi dan mengambil aspirasi dari tuntutan kelompok Islam. Sesuai tuntutan kelompok Islam, pendidikan agama pun dicantumkan sebagai pendidikan wajib dan madrasah disejajarkan statusnya dengan sekolah umum.

Bahkan, dalam pasal 28 disebutkan bahwa guru agama harus seorang penganut agama yang bersangkutan dan diajarkan kepada murid yang se-agama. Penjelasan ini merupakan kehendak kelompok Islam untuk mencegah murid-murid yang muslim di sekolah Kristen diajari agama Kristen. Secara serentak, kelompok Kristen menolak dengan tegas ide ini dengan alasan bahwa sekolah mereka memiliki ciri dan karakter khas Kristen. Sementara orangtua murid diminta persetujuan bahwa anaknya hanya akan diajari agama Kristen di sekolah itu. Berkat protes yang sangat keras dari pihak Kristen, akhirnya

peraturan itu hanya berlaku dan diterapkan di sekolah-sekolah negeri.<sup>8</sup>

Undang-undang ini ternyata hanya tinggal harapan, karena tidak sesuai dengan kehendak masyarakat yang membutuhkan adanya restorasi fundamental dari sistem pendidikan di Indonesia. Seiring perjalanan waktu, RUU ini yang merupakan produk Orde Baru semakin terasa ketidakadilannya dan tidak sesuai dengan tantangan global. Dalam pelaksanaannya, RUU ini sangat sentralistik, kerja pendidikan diatur secara memusat, tidak demokratis yang berkaitan dengan adanya sekolah-sekolah negeri dan swasta yang berbeda diperlukan secara diskriminatif. Baik buruknya sekolah ditentukan pemerintah, bukan oleh pasar dan pengguna jasa pendidikan. Penyelenggaraan lembaga pendidikan dilaksanakan di bawah otoritas kekuasaan, lengkap dengan otoritas administrasi berakurasi pemerintahan, padahal pendidikan adalah kerja akademik bukan kerja perkantoran pemerintahan.

---

<sup>8</sup> Mujiburrahman, *Mengindonesikan Islam: Representasi dan Ideologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 261.

RUU ini juga tidak mampu menghindarkan kelemahannya sendiri untuk mengeliminasi dikotomi antara ilmu dan agama dan antara berbagai disiplin ilmu sebagai suatu kesatuan integral. Khusus pendidikan agama, RUU ini tidak secara kuat memberikan peluang dan isyarat pendidikan agama untuk mengintegrasikan diirnya dengan pendidikan umum, dan sebaliknya mengintegrasikan pendidikan umum ke dalam pendidikan agama. Pada hakikatnya ilmu adalah bagian esensial agama, karena itu pendidikan hanya satu, tidak ada pendidikan agama atau umum. Semua pendidikan apa pun jenisnya hanya bertujuan untuk mengembangkan *human dignity* tidak peduli apa pun suku dan agama peserta didik.

Sementara agama merupakan sumberdaya yang menjiwai nilai-nilai ilmu. Kenapa bisa begitu? Karena ketidakmampuan melakukan integrasi secara ideal agama terhadap ilmu adalah karena juga masih diajarkan secara terpisah-pisah, eksklusif (siswa hanya mengetahui agamanya masing-masing) dan diajarkan dengan otoritas agama (dogmatis). Sesungguhnya hanya sedikit dari ajaran agama, yaitu hal yang menyangkut

keyakinan, akidah dan syariah yang harus diajarkan secara doktriner sekitar 5 % dan yang 95 % masalah ilmu dan kehidupan duniawai yang diajarkan secara akademik.<sup>9</sup>

Setelah diurai tentang perjalanan sistem pendidikan nasional di atas, penting untuk mengkomparasikan pasal-pasal yang dianggap substansial dan krusial sebagai bentuk landasan untuk mengetahui apa sebenarnya yang membedakan diantara keduanya? Hal ini menjadi penting, karena setiap rezim pasti memiliki kebijakan dan peraturan yang berbeda dalam menentukan mekanisme kerja, terutama berkaitan dengan sistem pendidikan nasional yang sangat krusial bagi masa depan bangsa ke depan.

Pertama, soal fungsi pendidikan. UU No. 4/1950 tidak membicarakan soal fungsi pendidikan. Pasal 3 UU Nomor 2/1989 menyatakan, “pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional”. Sementara Pasal 3 RUU SPN menyatakan,

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

“pendidikan nasional berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan kemampuan serta pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat di tengah masyarakat dunia”. Jika ditelisik, rumusan fungsi pendidikan dalam RUU SPN ini lebih lengkap daripada UU lainnya. Perdebatan yang mungkin muncul hanyalah soal redaksionalnya, mana yang lebih tepat atau perlu diganti dengan kata yang tidak terlalu bombastis.

Kedua, menyangkut soal pendidikan agama. Dalam pasal 20 UU No 4/1950 dinyatakan bahwa dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orangtua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut dan cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah negeri diatur dalam peraturan pemerintah. Sementara UU No. 2/1989 tidak terdapat pasal khusus yang mengatur soal pendidikan agama. Dalam UU tersebut hanya ada pada penjelasan pasal 28 ayat 2 yang menyatakan bahwa “tenaga pengajar pendidikan agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan. Penjelasan ini kemudian



diangkat dalam pasal 13 ayat 1 butir a dalam RUU SPN yang menyatakan, “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”.<sup>10</sup>

Secara sekilas kita bisa melihat perbedaan ketiga peraturan pemerintah tersebut yang memungkinkan terjadi perubahan mendasar dari rumusan terbaru tentang sistem pendidikan nasional. Dalam UU No. 4/1950 itu yang diatur adalah pendidikan agama di sekolah negeri dan hak untuk menentukan pendidikan agama yang akan diikuti, itu pun berada pada orangtua, bukan sekolah atau negara. Sementara sikap negara yang demokratis dan toleran tercermin dalam Pasal 16 tentang guru, yang berbunyi “ Di dalam sekolah guru-guru harus menghormati tiap-tiap aliran agama”. Hal berbeda tampak dalam pasal 28 ayat 2 UU No 2/1989 dan RUU SPN yang hanya membatasi pada agama formal yang diikuti oleh pemerintah, sementara mereka yang memiliki keyakinan lain tidak masuk hitungan.

---

<sup>10</sup> Darmaningtyas, “Undang-Undang Pendidikan Dari Masa Ke Masa”, dalam *Kompas*, Senin, 09 Juni 2003.

## **Argumen Penolakan UU Sisdiknas Tahun 2003**

Pemberlakuan RUU Sisdiknas lahir dari sebuah gagasan besar untuk merubah UU Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989, yang dianggap terlalu bermuatan politis sehingga mematikan daya kreasi dan kreativitas masyarakat. Dengan diberlakukannya RUU Sisdiknas ini, maka muncul optimisme dan harapan tersendiri karena dianggap memberikan pencerahan dan pemberdayaan bagi pendidikan di Indonesia. Substansi dari RUU Sisdiknas ini secara eksplisit menyebut peran dan kedudukan pendidikan agama baik sebagai proses maupun sebagai lembaga.<sup>11</sup> Sementara tujuan pendidikan nasional menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 adalah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia

---

<sup>11</sup> Usman Abu Bakar dan Surohim, *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam: Respon Kreatif Terhadap Undang-Undang Sisdiknas* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2007), hlm. 4.

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.<sup>12</sup>

Lalu, apakah kontroversi mengenai peraturan sistem pendidikan ini berhenti begitu saja? Tentu saja tidak. Kontroversi ini berlanjut ketika terjadi pembahasan RUU pendidikan 2003 sebagai produk terbaru tentang pengaturan kehidupan keagamaan. RUU pendidikan ini pun menuai pro-kontro yang berkepanjangan bahkan semakin memanas sampai detik-detik terakhir proses pengesahannya, layaknya pro-kontra mengenai Piagam Jakarta 1945 yang kontroversial itu. Golongan mayoritas umat Islam mendukung, sementara kelompok Kristen minoritas menolak dengan tegas. Kelompok ini dengan segala potensi yang mereka miliki dan di bawah dukungan ormas-ormas mereka-Majelis Pendidikan Kristen, Majelis Nasional Pendidikan Katolik, Konferensi Waligereja Indonesia- turun *all-*

---

<sup>12</sup> RUU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, bab III pasal 3 (Bandung: Fokus Media, 2003), hlm. 6.

out menyuarakan penolakan melalui berbagai jalur, termasuk mendatangi DPR.<sup>13</sup>

Penolakan terhadap RUU Sisdiknas oleh pihak Kristen, didukung sepenuhnya oleh partai politik peraih suara terbanyak pemilu tahun 1999 yang lalu, yaitu PDIP. Pihak Kristen berpendirian bahwa agama tidak pantas dijadikan mata pelajaran di sekolah atau masuk kurikulum perguruan tinggi, karena tujuan pendidikan hanyalah untuk mencerdaskan, bukan menanamkan keimanan, ketakwaan, dan kemuliaan akhlaq. Maka kekuasaan agama harus dipisahkan dari kekuasaan negara (sekuler) dan negara tidak boleh mencampuri urusan agama.

Selain itu, mereka juga menilai bahwa RUU Sisdiknas bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melanggar HAM, mengingkari pluralisme, dan memberi peluang bagi negara untuk mengintervensi masyarakat dalam soal agama. Salah satu item yang paling dibenci mereka adalah pasal 13 ayat 1a, yaitu “hak peserta didik untuk mendapatkan

---

<sup>13</sup> Burhanuddin Daya, *Agama Dialogis: Merenda Dialektika Idealita dan Realita Hubungan Antaragama*, (Yogyakarta: Mataram-Minang Lintas Budaya, 2004), hlm. 248.

pendidikan agama (di lembaga pendidikan apa pun) sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”. Maka muncul pertanyaan, mengapa ketentuan yang begitu netral, objektif, rasional, dan adil seadil-adilnya ditentang mati-matian oleh pihak Kristen? Banyak analisis yang telah diungkap untuk menjawab pertanyaan itu. Salah satu jawaban yang kemungkinan belum diungkapkan adalah bahwa pasal ini akan menyumbat salah satu chanel kristenisasi. Selama ini lembaga pendidikan Kristen merupakan lahan kristenisasi yang paling subur.

Lalu mengapa PDIP tidak bisa menerima kehadiran UU Sisdiknas ini? Salah satunya karena tidak senang dengan term ‘iman, takwa, dan akhlak mulia’ yang tercermin di dalamnya. Unsur-unsur ini dinilai sebagai irasional dan anasional, sementara katanya mereka sangat menjunjung tinggi nasionalisme. Kecenderungan mereka seperti sangat wajar, karena mereka sebelumnya sejak semula sudah acuh tak acuh terhadap hal-hal yang bernilai transendental. Bagi umat Islam, tujuan pendidikan bukan sekadar mencerdaskan tapi juga

mengangkat martabat bangsa dan menjadikan manusia yang beradab. Aspirasi yang diperjuangkan kaum muslimin sama sekali ditentang habis oleh PDIP. Hal ini juga dapat dipahami bahwa PDIP pada dasarnya dilahirkan dari rahim non-muslim. Dia lahir dari fusi berbagai organisasi sosial politik yang berideologi nasionalis sekuler, yaitu PNI, IPKI, Murbam, dan Partai Katolik.

### **Beberapa Kelemahan dalam UU Sisdiknas 2003**

Keberadaan Undang-Undang Pendidikan sesungguhnya ditunjukkan untuk perbaikan dan kemajuan bangsa dari keterbelakangan dan kebodohan, namun tidak ada garansi bahwa undang-undang pendidikan secara otomatis akan membawa perubahan mendasar bagi kemajuan bangsa. Setiap kemunculan undang-undang baru, mau tidak mau harus dikritisi dan direfleksikan ulang agar tidak menimbulkan kerugian dan penyesalan di kemudian hari, terutama bagi proses pencerdasan kehidupan bangsa yang menjadi cita-cita kemerdekaan sejak dulu kala. Alangkah baiknya kalau setiap kebijakan tentang

undang-undang pendidikan harus dicermati dengan penuh kesungguhan untuk memperbaiki sistem dan metode pembelajaran yang menitikberatkan pada proses pencerdasan anak bangsa.

Menghadirkan kelemahan-kelemahan UU Sisdiknas bukan berarti ingin menegasikan semua pasal-pasal yang telah dirumuskan dalam peraturan pemerintah ini, namun hanya sekadar memberikan masukan yang bersifat konstruktif terkait dengan kelemahan filosofis dari sistem pendidikan ini. Hal ini disadari karena engesahan naskah UU Sisdiknas ini pun menelan banyak biaya yang relatif banyak, namun hasilnya jauh dari kata memuaskan. Dengan kata lain, bahwa secara filosofis, UU Sisdiknas mempunyai beberapa kelemahan yang amat menonjol dan menimbulkan keresahan bagi semua pemerhati pendidikan dan masyarakat secara umum. Lalu apa kelemahan mendasar UU Sisdiknas 2003 ini bila dikontekstualisasikan dengan proses pencerdasan kehidupan bangsa yang menjadi cita-cita bersama?

Secara filosofis, keberadaan UU Sisdiknas memang belum menyentuh terhadap aspek nilai (*value*) yang terkandung dalam substansi pendidikan. Kelemahan fundamental UU Sisdiknas ini bisa dicermati dari tidak adanya ruh yang menjiwai pendidikan nasional dan proses pencerdasan kehidupan bangsa. Padahal, inti dari segala inti pendidikan ada pada ruh pendidikan yang mengakar kuat dalam keberibadian dan jiwa anak didik. Ruh pendidikan itu ada lima, diantaranya kasih sayang (*love and affection*), kejujuran (*honesty*), keikhlasan (*sincerity*), keagamaan (*religiusity*), dan kekeluargaan (*family atmosphere*).<sup>14</sup> Ruh pendidikan tersebut seharusnya diaktualisasikan dalam dimensi-dimensi pendidikan yang bersifat praksis dan menyentuh terhadap perasaan anak didik sebagai generasi terdidik yang memiliki masa depan cerah untuk membangun pendidikan yang lebih gemilang.

Dimensi-dimensi yang terdapat dalam ruh pendidikan seharusnya menjadi titik tekan dalam UU Sisdiknas, bukan

---

<sup>14</sup> Ki Supriyoko, "Hentikan RUU Sistem Pendidikan Nasional", dalam Darmanigtyas (ed.), *Membongkar Ideologi Pendidikan: Jelajah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Resolusi Press Bekerjasama dengan Ar-Ruzz Media, 2004), hlm. 180.



malah mengabaikan terhadap peran keluarga yang merupakan pendidikan utama bagi pembinaan karakter anak didik. Pendidikan dalam konteks kekinian adalah upaya untuk mengembangkan, mendorong, dan mengajak manusia agar tampil lebih progresif dengan berdasarkan pada nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia agar terbentuk pribadi yang sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun perbuatan. Dengan demikian, pendidikan bertujuan untuk membentuk pribadi manusia seutuhnya, yang pada akhirnya akan menjadi *insan kamil* sehingga memiliki integritas yang tinggi dalam mengembangkan fitrahnya sebagai mahluk yang bermartabat dan berkeperibadian luhur kepada sesama manusia.

Pendidikan yang ideal seharusnya dilakukan sebagaimana orangtua mendidik anak di dalam keluarga. Dalam keluarga (yang baik), orangtua yang mendidik anaknya, pasti dilakukan dengan kasih sayang, jujur, ikhlas, bernuansa keagamaan, apa pun agamanya. UU Sisdiknas ini menjadi cermin bagaimana nilai-nilai keluhuran pendidikan belum tersentuh dalam bingkai keberagaman anak didik. Apalagi kekhawatiran mengenai

pendidikan moral yang sering terabaikan dalam pembelajaran di sekolah, setidaknya menjadi refleksi kritis bagi kita semua guna meningkatkan pembinaan agama secara benar dan menyentuh hati nurani anak didik agar tidak mudah terbuai oleh rayuan globalisasi maupun kebudayaan populer yang menghantam jiwa generasi muda kita.

Pembinaan pendidikan moral tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah semata, melainkan juga harus sinergis dengan pembinaan yang ada di lingkungan keluarga sebagai pendidikan pertama yang memiliki peranan signifikan bagi pembentukan keperibadian anak. Ini karena, hubungan orangtua-anak bukan hubungan formal, (apalagi) birokratis, tetapi merupakan hubungan penuh kasih sayang, kejujuran, dan keikhlasan. Dan inilah yang sebenarnya menjadi ruh pendidikan yang melandasi setiap nafas pendidikan yang memberikan ruang terbuka bagi terciptanya generasi emas bagi masa depan bangsa. Maka, keluarga sebagai bagian dari lembaga pendidikan (*education institution*) secara otomatis memberikan motivasi kepada anak mereka untuk selalu memegang teguh nilai-nilai

keagamaan sebagai pedoman hidup bagi perjalanan mereka mengarungi kehidupan ini.<sup>15</sup>

Kelemahan mendasar dari UU Sisdiknas ini bisa kita cermati dari pengabaikan semua aspek yang menjadi ruh pendidikan nasional. UU Sisdiknas secara sepihak telah mengabaikan nilai-nilai yang terkandung dalam ruh pendidikan itu sendiri sehingga mengakibatkan terjadinya distorsi dalam soal peran orangtua atau keluarga. Tidak secuil pun UU Sisdiknas menyinggung masalah kasih sayang dan kejujuran serta tidak sepotong pun UU ini menempatkan keikhlasan, keagamaan, dan kekeluargaan dalam posisi yang strategis dan tepat guna. Hal ini menjadi kekeliruan fatal UU Sisdiknas yang terkesan atau seolah-olah menempatkan peran orangtua dalam posisi sebagai pembimbing dan pengawasan anak. Maka menjadi maklum bila penyusunan pasal 8 ayat 4 “*Orangtua wajib mengawasi dan membimbing perilaku anaknya*”, dikatakan sebagai pasal yang rancu dan ambigu.

---

<sup>15</sup> Mohammad Takdir Ilahi, *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral*, hlm. 21.

Kalimat dalam pasal 8 ayat 4 ini, mencerminkan sebuah rumusan yang tidak tepat sasaran, bahkan menimbulkan multitafsir dalam konteks implementasinya. Barangkali rumusan tersebut dibuat oleh orang yang tidak tahu tentang pendidikan, sehingga bunyi ketentuan itu menjadi bahan tertawaan masyarakat awam sekalipun. Dari kalangan masyarakat yang terdidik sekalipun, akan mengatakan bahwa rumusan dari ketentuan itu tidak tepat dan mencerminkan ketidaktahuan (kurang benar) dalam menyusun sebuah kalimat sehingga menimbulkan kerancuan dalam memahami substansi pendidikan. Rumusan pasal tersebut kurang tepat, karena tanpa kewajiban dari pemerintah dengan regulasi undang-undang pun, setiap orangtua secara naluriah akan mengawasi dan membimbing anak mereka.

Maka, pendidikan itu harus dijalankan sebagaimana orangtua mengawasi dan membimbing anak dengan penuh kasih sayang, kejujuran, keikhlasan, dan keagamaan dalam nuansa kekeluargaan yang penuh keintiman. Di sini UU Sisdiknas lemah dalam konteks filosofis, karena tidak ada ruh pendidikan

yang memastikan anak didik dibekali dengan nilai-nilai universal yang bersifat mendidik. Tanpa adanya ruh pendidikan, bisa dipastikan bahwa proses pembelajaran anak didik akan cenderung mekanistik, formalistik, legalistik, kering nilai dan makna, bahkan lebih mempertontonkan sistem pendidikan yang birokratis dan komersialis. Ketika ruh pendidikan ini tidak tersentuh dalam sistem pendidikan nasional, maka generasi terdidik yang dihasilkan akan jauh dari penanaman moral.

### **Pasal Agama atau Pendidikan? Cermin UU Pendidikan yang Tidak Mencerdaskan**

Kenapa UU Sisdiknas dipermasalahkan dan diperdebatkan sedemikian rupa oleh banyak kalangan? Apa yang membuat UU pendidikan ini ditolak mentah-mentah oleh kalangan Kristiani? Apakah pasal agama menjadi isu dominan dalam perdebatan tentang pengesahan UU pendidikan yang menuai banyak pertentangan dan penolakan? Pertanyaan ini menjadi inti persoalan dari sekian pasal yang terkandung dalam UU Sisdiknas, sehingga membutuhkan analisa lebih mendalam dan

refleksi kritis dari semua pihak untuk menyikapi secara arif persoalan utama yang meresahkan sebagian elemen masyarakat, terutama elemen yang tidak setuju dengan adanya UU Pendidikan ini.

Dari sub di atas, perlu menghadirkan letak persoalan UU Sisdiknas yang menjadi perdebatan serius di berbagai media massa dan ditentang secara serentak oleh para aktivis dan pihak Kristen. Apakah memang betul terdapat pasal yang rancu dan tidak mencerdaskan bagi kehidupan bangsa atau tidak? Jika memang ada, apakah pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 45 atau tidak? Dalam UU Sisdiknas terdapat pasal 4 mengenai rumusan tujuan pendidikan yang dianggap terlalu berat beban agamis atau agama centris, bahkan tidak mencerdaskan bagi kehidupan bangsa. Pasal 4 itu berbunyi *“Pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, sehat, berilmu, cakap, serta menjadi warga negara yang demokratis, bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air”*.

Pasal 4 dalam UU Sisdiknas memang syarat dan kental dengan nuansa agamis, bahkan terdapat ketidakjelasan paradigma yang dianut. Pasal ini cukup risih, karena hanya dua kali di dua pasal yang menyebutkan kata mencerdaskan, yaitu pada pasal 1 dan pasal 3 tentang fungsi pendidikan. Sementara kata keimanan dan ketakwaan justru disebutkan sampai sembilan kali, bahkan kata ke-agama-an mencapai 16 kali. Pasal ini terjadi ketimpangan dan kesenjangan yang cukup mencolok menyangkut nuansa agamaisasi<sup>16</sup> sebagai warna sistem pendidikan nasional. Ketimpangan dalam pasal ini mencerminkan ambiguitas dari sistem pendidikan nasional yang tidak bisa membedakan aturan yang mesti dipakai dalam mengelola keberagaman masyarakat Indonesia.

Minimnya kata mencerdaskan yang disebut dalam UU Sisdiknas ini mengindikasikan bahwa implementasi tujuan pendidikan yang dicita-citakan belum menyentuh terhadap proses pencerdayaan bangsa. Apalagi, rumusan dari ketentuan

---

<sup>16</sup> Mohammad Takdir Ilahi, "Meneguhkan Semangat Toleransi, Mencegah Agamaisasi Kekerasan", dalam *Jurnal Religiosa*, Vol. 2, No. 1, Maret 2011, hlm. 53.

itu syarat beban agamis sehingga patut dicurigai sebagai upaya dakwah lewat pasal pendidikan-untuk tidak mengatakan islamisasi-yang cukup efektif untuk mengembangkan pendidikan agama dalam konteks pluralitas bangsa. Implementasi dari pasal yang sarat beban agamis, secara tidak langsung telah menimbulkan paradoks besar (*grand paradox*) yang eksplisit mengenai pendidikan sebagai institusi untuk mengembangkan keilmuan dan fungsi tempat ibadah dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi orang-orang yang sudah mewarnai keberagaman mereka. Pasal ini semakin menjadi paradoks ketika pendidikan agama dimasukkan sebagai bagian dari rekayasa sistematis negara untuk membuat anak didik terasing dari keberagaman masyarakat yang plural. Bahkan, realitas perilaku agama yang buruk itu harus dicerminkan dalam perumusan UU Sisdiknas yang meresahkan sebagian kalangan masyarakat.

Rumusan UU Sisdiknas semakin tidak substantif ketika pasal 13 ayat 1a memuat ketentuan tentang pendidikan agama. Pasal 13 berbunyi bahwa “*Setiap peserta didik pada satuan*



*pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama*”. Pasal ini mengandung pengertian bahwa setiap satuan pendidikan yang memiliki karakteristik agama yang berbeda dengan peserta didik yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikannya, meskipun jumlahnya tidak signifikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama dan menyediakan pendidiknya yang seagama dengan peserta didik tersebut. Hal inilah yang menjadi kontroversi para tokoh, kalangan, dan berbagai organisasi masyarakat.

Pada prinsipnya, bunyi pasal itu bisa diterima karena sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan UUD 1945, namun pada penjelasan yang menyatakan bahwa pendidikan agama harus diajarkan oleh pendidik yang seagama untuk menjamin kebenaran pemahaman dan penafsiran terhadap ajaran agama sulit diterima. Tidak bisa diterima, karena peraturan itu mencerminkan pemaksaan kehendak terhadap anak didik yang belajar di lembaga sekolah bercorak Kristen atau corak keagamaan yang lain. Sebenarnya setiap orang berhak

memperoleh pendidikan agama sesuai dengan apa yang dianut, namun dalam masyarakat demokratis-pluralis, orang juga harus dihargai bila tidak menggunakan haknya untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan keluarga yang dianggap lebih baik. Pemaksaan terhadap kehendak setiap orang (peserta didik) menjadi cerminan dari pelanggaran hak asasi manusia dan bisa mematikan iklim demokrasi yang telah dibangun di negeri kita tercinta.

Kejanggalan dalam pasal 13 ini semakin mencerminkan intervensi pemerintah (kekuasaan) terhadap urusan keyakinan keagamaan anak didik melalui sistem pendidikan yang sarat dengan kepentingan politik.<sup>17</sup> Keharusan menyelenggarakan pendidikan agama bagi satuan pendidikan yang menerima peserta didik yang berbeda agama merupakan pemaksaan kehendak dan intervensi terlalu jauh pihak pemerintah. Inilah yang mereka maksud pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tidak mencerminkan sikap demokratis dan diskriminatif. Pendidikan agama sebaiknya diserahkan kepada masyarakat dan

---

<sup>17</sup> Zainal Abidin Bagir dkk, *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keagamaan di Indonesia*, (CRCS-Mizan, 2011), hlm.

sudah selayaknya tidak diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas. Bahkan pendidikan agama yang dilaksanakan selama ini tidak nampak faedahnya, banyak masyarakat Indonesia dalam mengaplikasikan hidupnya jauh dari nilai-nilai agama, sehingga kegiatan-kegiatan maksiat, kolusi, korupsi semakin merajalela. Hal senada disampaikan oleh kurang lebih 40 (empat puluh) kelompok yang mengatasnamakan lembaga, asosiasi, dan organisasi masyarakat bahwa RUU/UU Sisdiknas bukan semata-mata pro dan kontra, tetapi sudah merupakan pelanggaran HAM, tujuan nasional, UUD 1945, dan miskin filosofi dan substansi.

Di sinilah muncul pertanyaan, benarkah pasal 13 dalam UU Sisdiknas akan menjamin keberlangsungan kehidupan beragama, meskipun dalam satu agama tertentu terdapat aliran-aliran, sekte atau madzhab yang bertentangan satu sama lain? Jawabannya tentu saja belum tentu menjamin, walau secara redaksional, pasal tersebut bisa dibenarkan, karena kalimatnya mengandung adanya hak bagi peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

Namun demikian, ada dua redaksi yang harus mendapat perhatian dan dijadikan renungan bersama, yaitu kata “hak” dan kalimat “pendidikan yang seagama” yang menuai multi-tafsir. Dua redaksi itu perlu ditinjau kembali, apakah sudah relevan atau tidak untuk dijadikan rangkaian kalimat dalam memberikan hak sepenuhnya kepada peserta didik.

Lalu apa arti hak kaitannya dengan pasal 13 dalam UU Sisdiknas ini? Hak berarti menuntut suatu keharusan bagi peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya. Hak itu berarti, meski anak didik adalah beragama muslim, namun bersekolah di lembaga pendidikan Katolik, maka dia berhak menuntut pendidikan agama Islam. Begitu juga sebaliknya, hak anak didik non-muslim untuk mendapatkan pendidikan agamanya ketika belajar di lembaga pendidikan atau sekolah muslim. Maka, sekolah dituntut untuk menyediakan fasilitas dan kurikulum semua agama bagi siswanya yang memiliki beragam keyakinan dan kepercayaan.<sup>18</sup>

Tidak heran bila muncul pertanyaan, mampukah setiap institusi

---

<sup>18</sup> Syukron Habieb Ichsan, “RUU Sisdiknas: Benarkah (Hanya) Persoalan Agama”, dalam *Bernas*, 6 Juni 2003.

pendidikan memberikan fasilitas tanpa membedakan latar belakang kehidupan (status sosial, agama, suku, adat istiadat, bahasa, budaya, dan lain sebagainya)?

Sementara redaksi kedua yang menuai muti-tafsir adalah “pendidik yang seagama”. Bila dicermati, kalimat tersebut memang terkesan sempurna tanpa celah sekalipun, yang mengandaikan adanya ruang kebebasan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama dari yang seagama. Meski demikian, benarkah pengajar agama tersebut mampu mewakili seluruh mazhab yang terdapat dalam satu agama, apalagi beragam agama? Fenomena yang tampak dalam dunia pendidikan di Indonesia, pendidik yang mengajar pendidikan agama seringkali tidak mampu mengakomodir atau merangkul seluruh pemahaman peserta didiknya dalam beragama, sehingga terkesan adanya pemaksaan doktrin, ideologi, atau pemahaman ajaran oleh satu aliran saja. Situasi ini bisa menjadi anomali bagi sistem pendidikan yang lebih menonjolkan beban agamis daripada cita-cita luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

## **Simpulan**

Kita sebagai umat dan bangsa beragama merasa prihatin dan *nelangsa* melihat kondisi seperti itu. Negara Indonesia adalah negara agamis “katanya”, tetapi ketika permasalahan agama (termasuk pendidikan agama) diatur dalam sebuah undang-undang terjadi berbagai kontroversi. Barangkali kontroversi dinilai baik dan sah-sah saja sepanjang substansinya mengarah pada perbaikan hasil yang optimal. Yang menjadi permasalahan adalah terjadinya kontroversi yang tendensius dan dipolitisasi. Kita semua merasa prihatin, sekian tahun kita bernafas di era reformasi dan jauh dari masa orde baru masih ada kelompok-kelompok yang mau dimanfaatkan dan memanfaatkan. Sebaiknya semua pihak harus bisa berlapang dada, *legowo*, berhati dingin dan berpikiran jernih sehingga semua permasalahan termasuk masalah Pendidikan Agama dalam UU Sisdiknas dapat diselesaikan.

## Daftar Pustaka

- Bakar, Usman Abu dan Surohim, *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam: Respon Kreatif Terhadap Undang-Undang Sisdiknas*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2007.
- Darmanigtyas (ed.), *Membongkar Ideologi Pendidikan: Jelajah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Resolusi Press dan Ar-Ruzz Media, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Pendidikan Rusak-Rusakan*, Yogyakarta: LKIS, 2005.
- Darmaningtyas, “Undang-Undang Pendidikan Dari Masa Ke Masa”, dalam *Kompas*, Senin, 09 Juni 2003.
- Daya, Burhanuddin, *Agama Dialogis: Merenda Dialektika Idealita dan Realita Hubungan Antaragama*, Yogyakarta: Mataram-Minang Lintas Budaya, 2004.
- Ilahi, Mohammad Takdir, *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Ilahi, Mohammad Takdir, *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21 (The New Mind Set Of National Education in the Centrty)*, Yogyakarta: Safiria Insania Press Kerjasama dengan Magister Studi Islam UII, 2003.

Mujiburrahman, *Mengindonesikan Islam: Representasi dan Ideologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

RUU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, Bab III pasal 3, Bandung: Fokus Media, 2003.

Sirozi, Muhammad, *Politik Kebijakan Pendidikan: Peran Tokoh-Tokoh dalam Penyusunan UU No. 2/1989*, Jakarta: INIS, 2004.